LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa

Desember 2025



Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Outline

01 Gambaran umum PBJ di Desa

02 Perencanaan PBJ di desa;

03 Persiapan PBJ di desa



04 Pelaksanaan PBJ di desa

05 Pelaporan dan serah terima

06 Pengawasan PBJ di desa

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

01

GAMBARAN UMUM



Visit Our Website:
temanku.lkpp.go.id



Gambaran Umum PBJ Desa

Desa memiliki kewenangan penuh dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan (UU 6/2014).

Lebih dari 74.900 desa di Indonesia.

Prinsip utama: Swakelola dengan ketentuan:

- Menggunakan material lokal
- Gotong royong & partisipasi masyarakat
- Membuka lapangan kerja
- Pemberdayaan masyarakat

Diatur dalam PerLKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara PBJ di Desa.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Gambaran Umum PBJ Desa

Pelaksanaan PBJ Desa

01 Memaksimalkan penggunaaan material/bahan dari wilayah setempat

02 Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat

03 Untuk memperluas kesempatan kerja; dan/atau

04 Untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Tantangan PBJ

01 Proses PBJ dari perencanaan hingga pertanggungjawaban belum optimal

02 SDM desa masih minim pemahaman PBJ

03 Ada potensi kesalahan dalam proses PBJ di Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan

04 Belum adanya pendamping/ tim teknis dalam pelaksanaan pengadaan/ jasa.

Gambaran Umum PBJ Desa

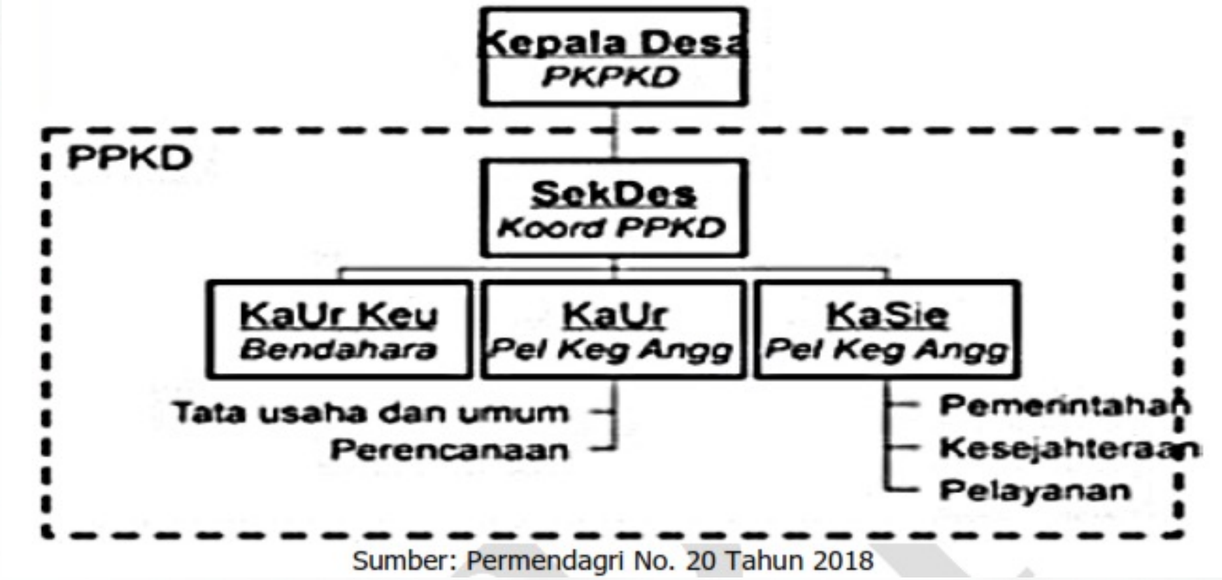
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (2)).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas:

- Transparan
- Akuntabel
- Partisipatif
- Tertib dan disiplin anggaran

(Diatur dalam Permendagri 20/2018 Pasal 2 ayat 1)



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018



Gambaran Umum PBJ Desa

B. Kewenangan Desa

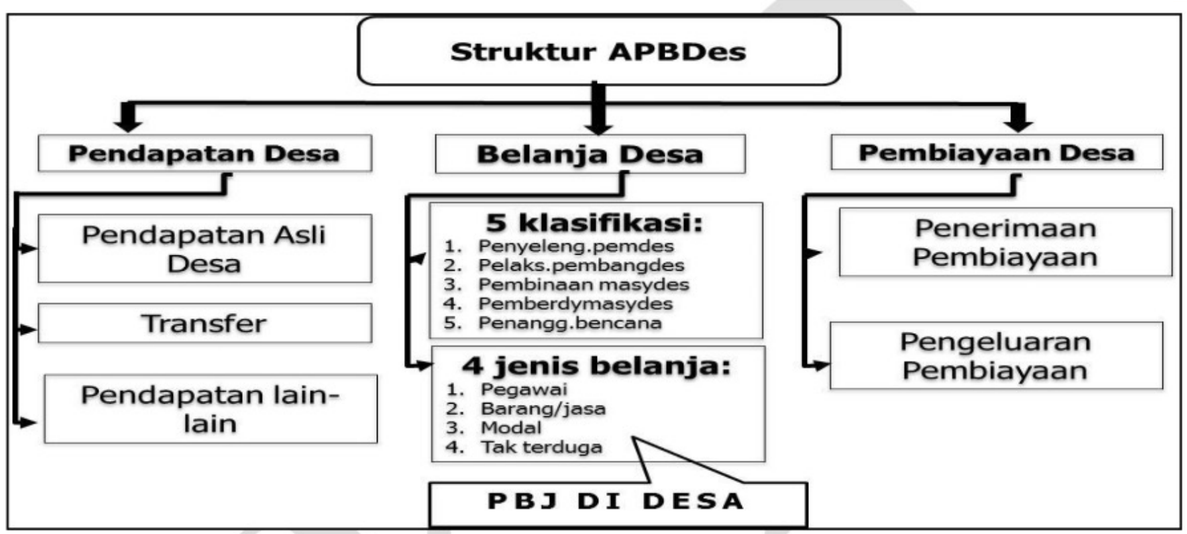
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 9).

Gambaran Umum PBJ Desa

C. Kedudukan PBJ di Desa dalam APB Desa



Kedudukan PBJ dalam Struktur APB Desa



Sumber: diolah dari UU 6/2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Gambaran Umum PBJ Desa

D. Prinsip Pengadaan Barang Jasa Desa



01 Efisien

02 Efektif

03 Transparan

04 Terbuka

05 Bersaing

06 Pemberdayaan Masyarakat

07 Gotong-royong

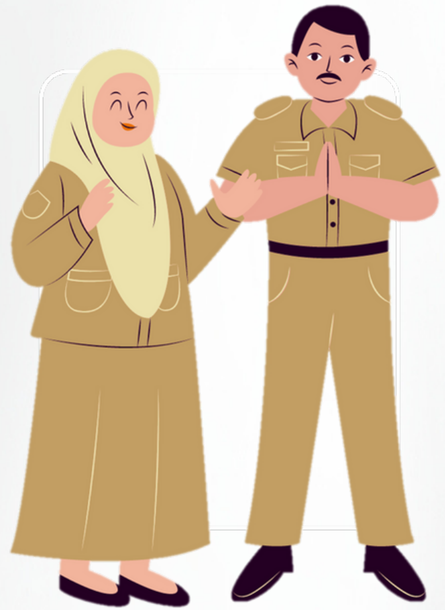
08 Adil

09 Akuntabel

Gambaran Umum PBJ Desa

D. Para Pihak dalam PBJ Desa

- Kepala Desa
- Kepala Seksi (Kasi)
- Kepala Urusan (Kaur)
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Masyarakat
- Penyedia



PARA PIHAK ...

Tugas dan Kewenangan

Kepala Desa



- **Menetapkan TPK** berdasarkan hasil Musrenbangdes
- **Mengumumkan Rencana Kerja Kegiatan Desa** sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan.
- **Menyelesaikan perselisihan** antara Kasi/Kaur denganTPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Kasi/ Kaur



- **Menetapkan dokumen persiapan** Pengadaan
- **Menyampaikan** dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK
- **Melakukan Pengadaan** sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes
- **Menandatangani bukti transaksi** Pengadaan
- **Mengendalikan** pelaksanaan Pengadaan
- **Menerima hasil** Pengadaan
- **Melaporkan** pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa
- **Menyerahkan hasil Pengadaan** pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan

© Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus | LKPP

PARA PIHAK ...

Tugas dan Kewenangan



- melaksanakan **Swakelola**
- menyusun **dokumen Lelang**
- **mengumumkan dan melaksanakan Lelang** untuk Pengadaan melalui Penyedia
- **memilih dan menetapkan** Penyedia
- **memeriksa dan melaporkan** hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur
- **mengumumkan hasil** kegiatan dari Pengadaan

Unsur TPK

- Perangkat Desa
- Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan
- Masyarakat

Organisasi TPK

- Ketua
- Sekretaris
- Anggota

Jumlah TPK

Minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang jumlah gasal

PARA PIHAK

Tugas dan Kewenangan

Masyarakat



- **Berpartisipasi** dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola
- Berperan aktif dalam **pengawasan** terhadap pelaksanaan Pengadaan

Penyedia

memenuhi persyaratan berikut:



- **memiliki tempat/lokasi usaha**, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya
- **memiliki sumber daya** manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan
- **memiliki kemampuan** untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu **menyediakan tenaga ahli** dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

02

PERENCANAAN PBJ DI DESA



Visit Our Website:
temanku.lkpp.go.id



LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pelaksanaan Perencanaan PBJ di Desa

Perencanaan PBJ di Desa paling kurang meliputi **identifikasi kebutuhan**, **penyusunan spesifikasi teknis/KAK** dan **penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)**.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu tahapan dimana **kebutuhan masyarakat Desa bisa diidentifikasi** dan dianggarkan yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (**Musrenbangdes**) sampai dengan diumumkannya perencanaan PBJ di Desa.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pelaksanaan Perencanaan PBJ di Desa

Penyusunan RKP desa berpedoman pada:

1. hasil kesepakatan musyawarah desa
2. pagu indikatif Desa;
3. pendapatan asli Desa;
4. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahdaerah kabupaten/kota
5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
6. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Prioritas, program dan kegiatan kebutuhan masyarakat Desa

01 peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

02 peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

03 pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

04 pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

05 pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

06 peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

07 peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa

08 pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

09 pendayagunaan sumber daya alam;

Muatan Perencanaan Pengadaan

1. jenis kegiatan
2. Volume
3. Lokasi
4. Sasaran
5. Biaya
6. pelaksana kegiatan anggaran
7. waktu pelaksanaan kegiatan
8. tim yang melaksanakan kegiatan
9. rincian satuan harga untuk kegiatan PBJ yang akan dilakukan

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Muatan Pengumuman Perencanaan PBJ di Desa

- Lokasi
- Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
- Nama TPK;
- Waktu Pelaksanaan
- Nama Kegiatan
- Nilai PBJ di Desa
- Cara PBJ di Desa;

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa

Alur Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa

RPJM Desa → Musyawarah Desa → Rancangan RKP Desa / RAB + Proposal Teknis → Dokumen Perencanaan Pengadaan → Musrenbang Desa → Perdesa RKP Desa → Rancangan Perdesa APB Desa → Musyawarah BPD → Perdes APB Desa / Perkades Penjabaran APB Desa → DPA / RKA / RKK / RAB → Dokumen Persiapan Pengadaan



LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

03

PERSIAPAN PBJ DI DESA



Visit Our Website:
temanku.lkpp.go.id

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pengecekan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kasi/Kaur melakukan pengecekan DPA yang bertujuan untuk **memastikan bahwa rencana PBJ telah sesuai** dengan kegiatan, anggaran, lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan, dan rincian satuan harga untuk kegiatan PBJ di Desa yang akan dilakukan.



LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS ditetapkan oleh **Kasi/Kaur** menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan **merujuk pada harga pasar**

Apabila barang/jasa yang dibutuhkan **tidak ada di Desa setempat,** Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar

KONDISI

1. Hanya terdapat satu Penyedia
   → Harga Pasar = Harga yang ditawarkan
2. Terdapat lebih dari satu Penyedia
   → Harga Pasar = Harga yang sering ditemukan

PERHITUNGAN

1. Menggunakan data/informasi yang diperoleh dari harga pasar di Desa setempat atau Desa terdekat dari desa setempat
2. Memperhitungkan PPN
3. Memperhitungkan biaya angkut – Biaya tidak langsung lainnya

PERBANDINGAN HPS DENGAN RAB PADA DPA

1. HPS tidak melebihi Pagu Rincian Objek Belanja
   → Revisi RAB pada DPA
2. HPS melebihi Pagu Rincian Objek Belanja
   → Kasi/Kaur melapor pada Kepala Desa

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Dokumen persiapan PBJ Desa **Melalui Swakelola**

- Gambar rencana kerja;
- Jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Spesifikasi teknis;



- Peralatan;
- RAB dan Analisa Harga Satuan;
- Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Dokumen persiapan PBJ Desa **Melalui Penyedia**

Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

Waktu pelaksanaan pekerjaan;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)



KAK/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);

Rancangan surat perjanjian

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

04

PELAKSANAAN PBJ DI DESA



Visit Our Website:
temanku.lkpp.go.id

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PELAKSANAAN PBJ DI DESA MELALUI SWAKELOLA



PELAKSANAAN

Swakelola dilaksanakan oleh:

1) TPK; atau
2) TPK dengan melibatkan masyarakat

Tata cara:

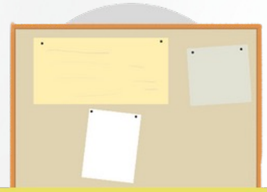
1) Pembahasan kegiatan
2) Menentukan narasumber
3) Menyusun laporan hasil pembahasan
4) Memanfaatkan sarana/prasarana di Desa



PENGENDALIAN

Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian meliputi:

1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
2) penggunaan narasumber / tenaga kerja, sarana prasarana / peralatan dan material/bahan.



PENGUMUMAN

Pengumuman hasil kegiatan meliputi:

1) Nama kegiatan
2) Nilai pengadaan
3) Keluaran/output
4) Nama TPK
5) Lokasi
6) Waktu pelaksanaan

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PELAKSANAAN PBJ DI DESA MELALUI PENYEDIA

Jenjang nilai Pengadaan melalui **Penyedia** dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota

CONTOH

Pembelian Langsung	Membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.	≤ Rp 10.000.000,- sampai dengan sepuluh juta
Permintaan Penawaran	Membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.	≤ Rp 200.000.000,- sampai dengan dua ratus juta
Lelang	Metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.	> Rp 200.000.000,- di atas dua ratus juta

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PELAKSANAAN PBJ DI DESA MELALUI PENYEDIA



1. PEMBELIAN LANGSUNG

Kasi/Kaur/TPK **memilih** Penyedia

Kasi/Kaur/TPK melakukan **negosiasi** untuk memperoleh harga yang lebih murah

Transaksi dalam bentuk bukti pembelian **atas nama/diketahui** oleh Kasi/Kaur

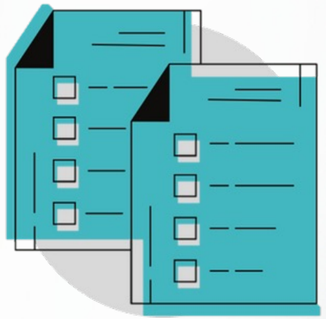
Dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PELAKSANAAN PBJ DI DESA MELALUI PENYEDIA



2. PERMINTAAN PENAWARAN

TPK meminta **penawaran tertulis** dari 2 Penyedia

Dokumen persyaratan teknis:
1. KAK
2. Rincian barang/jasa
3. Volume
4. Spesifikasi teknis
5. Gambar rencana kerja
6. Waktu pelaksanaan

TPK melakukan **evaluasi**

TPK memilih **Penyedia yang memenuhi persyaratan teknis dan harga**

1. > 1 Penyedia lulus maka TPK memilih **penawaran terendah**
2. hanya 1 Penyedia lulus maka TPK **melakukan negosiasi**
3. > 1 Penyedia dengan harga sama TPK **melakukan negosiasi**

1. Hasil negosiasi dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Negosiasi**
2. Transaksi dalam bentuk **bukti pembelian** atau **surat perjanjian**.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PELAKSANAAN PBJ DI DESA MELALUI PENYEDIA



3. LELANG

1. Pengumuman lelang

1. Nama paket
2. Nama TPK
3. Lokasi
4. Ruang lingkup
5. Nilai total HPS
6. Jangka waktu pelaksanaan
7. Jadwal proses lelang

2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang

3. Pemasukan dokumen penawaran

1. Dokumen administasi
2. Penawaran teknis dan harga

4. Evaluasi penawaran

Evaluasi administrasi, teknis, dan harga

5. Negosiasi Harga

Dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi

6. Penetapan pemenang

1. Harga penawaran terendah
2. dituangkan dalam surat perjanjian antara Kasi/Kaur dengan Penyedia

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PENGUMUMAN PBJ DI DESA

PENGUMUMAN

TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang



MELIPUTI

1. Nama kegiatan
2. Nama penyedia
3. Nilai pengadaan
4. Keluaran/*output* (volume dan satuan)
5. Lokasi
6. Waktu penyelesaian

Bukti Transaksi

- Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
  a. **bukti pembelian** berupa setruk, nota dan kuitansi
     → Pembelian Langsung dan Permintaan Penawaran
  b. **surat perjanjian**

Persyaratan Administrasi

- Persyaratan administrasi untuk penyedia berupa **Surat Pernyataan Kebenaran Usaha**
- Untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, traktor, genset, dan pengadaan melalui Penyedia dengan metode Lelang berupa **Izin Usaha dan NPWP**

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SANKSI

Sanksi bagi Penyedia Barang/Jasa

1. Mempengaruhi Kasi/Kaur/TPK secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan tertentu.
2. Bersekongkol dengan penyedia lain untuk mengatur harga penawaran dan menghilangkan persaingan sehat.
3. Memberikan dokumen/keterangan palsu untuk memenuhi persyaratan PBJ.
4. Mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kerja.

Bentuk Sanksi bagi Penyedia

1. Sanksi administratif: peringatan/teguran tertulis.
2. Gugatan perdata sesuai ketentuan hukum.
3. Pelaporan pidana kepada pihak berwenang.
4. Pembatalan sebagai pemenang bila terdapat penipuan/pemalsuan informasi.
5. Denda keterlambatan: … ‰ (perseribu) × nilai kontrak × jumlah hari keterlambatan (sesuai Peraturan Bupati/Walikota)

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

05

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA



Visit Our Website:
temanku.lkpp.go.id



TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:

a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).

Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:

a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).





→ Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa

→ Kasi/Kaur melakukan **pengarsipan dokumen** terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- Musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak
- Musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa
- Penyelesaian melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PEMBINAAN PENGADAAN



Pembinaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang **membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat** Daerah dengan melibatkan **UKPBJ** di kabupaten/kota setempat

Organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat melakukan konsultasi kepada LKPP

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

06

PENGAWASAN PBJ DI DESA



Visit Our Website:
temanku.lkpp.go.id

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pengadaan secara Swakelola

1. Kasi/Kaur melaksanakan pengawasan terhadap:
   1) kemajuan kegiatan
   2) penggunaan sumber
2. Kasi/Kaur melakukan evaluasi kegiatan
3. Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan

Pengadaan melalui Penyedia

1. Kasi/Kaur melaksanakan **pengawasan**
2. Kasi/Kaur melakukan memerintahkan perbaikan target dan realisasi bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target
3. Kasi/Kaur memberikan sanksi kepada Penyedia bila tidak mampu mencapai target

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Thank You

For Your Attention

08-09 Desember 2025

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

